



1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Untuk menyajikan capaian kinerja makro, Pemerintah Kota Bekasi menggunakan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Bekasi pada tahun 2023, yaitu capaian kinerja makro tahun 2023 dan pembandingnya adalah Capaian Kinerja Makro tahun 2022 yang tertuang dalam Buku Kota Bekasi Dalam Angka (*Bekasi Municipality in Figures 2023*, sebagai berikut:

1. Indikator pertama dalam capaian kinerja makro adalah Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi tahun 2023 sebesar 83,06 poin, capaian ini meningkat sebesar 0,654 persen dari tahun 2022 yang mencapai 82,52 poin.
2. Indikator kedua dalam capaian kinerja makro adalah Angka Kemiskinan, dimana angka kemiskinan Kota Bekasi tahun 2023 sebesar 4,10 persen, angka ini menurun dari tahun 2022 yang hanya 4,43 persen, penurunan angka kemiskinan sebesar -7449 persen.

- Indikator ketiga adalah angka pengangguran, dimana angka pengangguran di Kota Bekasi pada tahun 2023 sebanyak 104.170 orang, hal ini mengalami penurunan sangat signifikan dari tahun 2022 sebesar 167,974 orang, hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pada indikator kinerja ini sebesar -10.329 persen.
- Indikator keempat adalah Pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi mencapai 5,43 persen, mengalami peningkatan yang sangat positif dari capaian tahun 2022 yang mencapai 4,96 persen. Dengan demikian pada kinerja ini mengalami peningkatan kinerja sebesar 9.476 persen.
- Indikator kelima adalah pendapatan per kapita, dimana pendapatan per kapita Kota Bekasi tahun 2023 sebesar Rp. 45.281.175,- capaian ini meningkat sebesar 7.064 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 42.293.446,- Peningkatan ini terjadi karena peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi tahun 2023 yang meningkat dibandingkan dengan Tahun 2022.

- Indikator keenam adalah Indeks Gini, dimana Indeks Gini Kota Bekasi Tahun 2023 sebesar 0,414 poin sedangkan pada tahun 2022 sebesar 0,441 poin. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Kota Bekasi berada pada tingkat ketimpangan sedang (moderat).

Adapun capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota Bekasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	82,46	83,06	0.654
2	Angka Kemiskinan	4,43	4,10	-7449
3	Angka Pengangguran	8,81	7,90	-10.339
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,96	5,43	9.476
5	Pendapatan per Kapita	42.293.446,-	45.281.175	7.064
6	Ketimpangan Pendapatan	0,441	0,414	-6122

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban, Sub Urusan Kebakaran, Sub Urusan Bencana Daerah), dan Urusan Sosial. Untuk keenam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022, dimana terdapat 29 Indikator Standar Pelayanan Minimal dengan kondisi capaian sebagai berikut:

- 1. Urusan Pendidikan
 - A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Bekasi pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	81,49	85,24
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	93,95
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	101,13
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100



B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kota Bekasi sebesar Rp. 1.653.642.302.467 (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*). Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
URUSAN PENDIDIKAN			1.826.240.111.503	1.653.642.302.467	90,54
1	Dinas Pendidikan		1.753.334.180.169	1.584.483.009.775	90,37
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	948.774.369.286,00	824.927.397.346,00	86,95
	B	Program Pengelolaan Pendidikan	801.463.585.883,00	757.279.302.643,00	94,49
	C	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.655.000.000,00	2.004.836.086,00	75,51
	D	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	441.225.000,00	271.473.700,00	61,53
II	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		72.905.931.334,00	69.159.292.692	94,86
	A	Program Pengelolaan Pendidikan	72.905.931.334,00	69.159.292.692	94,86

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2023.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi	Menyampaikan data Penerapan SPM urusan Pendidikan Tahun 2023 meliputi Capaian Indikator Kinerja SPM, pemenuhan barang/jasa dan pemenuhan sumber daya manusia yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan	Sudah dipenuhi tepat waktu dan termuat dalam Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2022 yang telah disampaikan ke Sekber SPM pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
2.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	Menyajikan data kependudukan yang diperlukan untuk penghitungan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan paling lambat Minggu Pertama	Sudah dipenuhi tepat waktu dan termuat dalam Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2023 yang telah disampaikan ke Sekber SPM pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
		Bulan Januari 2023	
		Melakukan sinkronisasi data suspect ATS dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk dilakukan rekonsiliasi data dan melengkapi data <i>by name by address</i> hingga dikelompokkan per RW	Kegiatan ini belum diselesaikan dikarenakan belum ada petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi	Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menghitung dan merencanakan kebutuhan Penyelenggaraan Diklat Pendidikan Formal, Diklat Sertifikasi Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan dan Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan sehingga memenuhi	Pada tahun 2023 belum dilaksanakan, baru dilaksanakan pada Februari 2023.

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
		kebutuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan sampai 100 persen.	
		Menyampaikan data Penyelenggara n Diklat Pendidikan Formal, Diklat Sertifikasi Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan dan Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2023, meliputi program kegiatan, dan nilai anggaran yang harus disampaikan	Sudah dipenuhi tepat waktu dan termuat dalam Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2023 yang telah disampaikan ke Sekber SPM pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
		paling lambat tanggal 12 Januari 2023.	
4.	Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi	Mempersiapkan data siswa miskin yang diperlukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	Dinas Sosial telah menyampaikan data siswa miskin kepada Dinas Pendidikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menghitung dan merencanakan kebutuhan pembangunan Sarana Pendidikan pada tingkat PAUD dan Dikdas sehingga memenuhi kebutuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan sampai 100 persen.	Tahun 2022 Disperkimtan menerima usulan RAB dan Unit Sekolah Baru (USB) dari Dinas Pendidikan, dan juga telah dilaksanakan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru untuk PAUD, SD dan SMP pada tahun 2023.

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
		Menyampaikan data pembangunan Sarana Pendidikan pada tingkat PAUD dan Dikdas untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2023, meliputi program kegiatan, dan nilai anggaran yang harus disampaikan paling lambat tanggal 12 Januari 2023	Sudah dipenuhi tepat waktu dan termuat dalam Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2023 yang telah disampaikan ke Sekber SPM pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi	Melakukan reviu terhadap penetapan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan dalam dokumen RPJMD dan menetapkan target capaian indikator-	Telah dilakukan reviu terhadap indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di level RPJMD dan telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023 Perubahan yang telah disetujui DPRD Kota Bekasi dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Desember 2022, dan pada saat ini masih

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
		indikator Standar Pelayanan Minimal tersebut sebesar 100 persen setiap tahun.	proses evaluasi oleh Tim Gubernur Jawa Barat yang disampaikan melalui Surat Wali Kota Bekasi Nomor 050.6/7579/Bappelit bangda tanggal 23 Desember 2022 Hal Permohonan Evaluasi Raperda Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.
		Melakukan reviu dan pendampingan dalam proses revisi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah atas penetapan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan dengan target capaian 100 persen setiap tahun dan diselesaikan paling lambat 23 Februari 2023.	Telah dilakukan pendampingan dalam proses revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 dengan mereviu indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan beserta targetnya, namun perubahan Renstra tersebut baru akan disahkan pada tahun 2023.

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	Menyiapkan data dukung Kebijakan Umum Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 yang dialokasikan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada seluruh Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang terkait dengan Urusan Pendidikan yang harus disampaikan paling lambat tanggal 12 Januari 2023.	Sudah dipenuhi tepat waktu dan termuat dalam Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2023 yang telah disampaikan ke Sekber SPM pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
8.	Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Melaksanakan verifikasi faktual <i>suspect</i> ATS sesuai dengan data dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan melibatkan	Kegiatan ini belum diselesaikan dikarenakan belum ada petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
		unsur Kelurahan dan diselesaikan paling lambat 12 Januari 2023.	
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi	Mengkoordinasi kan seluruh rangkaian penerapan Standar Pelayanan Minimal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.	<div>1. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2019 telah diselesaikan tepat waktu dan telah disampaikan ke Sekber SPM pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah melalui Surat Wali Kota Nomor 100/2669/Setda Tapem tanggal 16 April 2020.</div> <div>2. Rangkaian penerapan Standar Pelayanan Minimal seluruhnya sudah dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan, mulai dari penyusunan roadmap, evaluasi Instruksi Wali Kota,</div>

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
			menyampaikan bahan masukan untuk revisi RPJMD 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah 2018-2023.
			3. Monev penerapan SPM Tahun 2020 telah dilakukan melalui Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 100/6920/SETDA.Tapem tanggal 10 Nopember 2020.
10.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi:	Memfasilitasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan setiap tahun.	Untuk tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak mengajukan kebutuhan pemenuhan Standar Pelayanan Miniman karena dianggarkan pada DPA Dinas Pendidikan.
		Menyampaikan data pengadaan barang/jasa untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan	Sudah dipenuhi tepat waktu dan termuat dalam Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi Tahun 2023 yang telah disampaikan ke

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
		Pendidikan Tahun 2023, meliputi program kegiatan, jenis barang, dan nilai anggaran yang harus disampaikan paling lambat tanggal 12 Januari 2023.	Sekber SPM pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
11.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi	Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi terhadap kebutuhan barang/jasa dan pembangunan sumber daya manusia pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan, baik pada saat perencanaan kebutuhan, perencanaan penganggaran maupun evaluasi pelaksanaannya.	Bagian Pembangunan telah memberikan asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan perangkat Daerah lain yang terkait.
12.	Kepala Bagian Kerjasama	Memfasilitasi perjanjian	Tahun 2023 belum ada kegiatan fasilitasi

No	Perangkat Daerah	Instruksi	Tindak Lanjut
	Setda Kota Bekasi	kerjasama dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan terkait pembiayaan peserta didik di sekolah-sekolah perbatasan.	perjanjian kerjasama dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan terkait pembiayaan peserta didik di sekolah-sekolah perbatasan, baru akan dilaksanakan tahun 2023.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Bekasi pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.b.1	Rasio daya tamping RS terhadap Jumlah Penduduk	2,25	2,40
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	91,30	97,92
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,15	92,91
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95,72	84,97
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,66	88,27
1.b.8	Persentase anak usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	38,09	27,96
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	76,91	92,70
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93,09	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	sesuai standar		
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,99	100
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100,90
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	83,61	101,86

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kota Bekasi sebesar Rp. 1.061.801.295.681,00 (*Satu Triliun Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu*

Rupiah). Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
URUSAN KESEHATAN		1.153.009.507.952,00	1.061.801.295.681,00	92,08
I	Dinas Kesehatan	566.837.652.819,00	499.860.348.089,00	88,18
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	223.159.541.750,00	196.963.394.413,00	88,26
	B Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	278.941.395.039,00	239.934.941.083,00	86,02
	C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	51.305.105.730,00	49.707.512.133,00	96,89
	D Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	458.660.000,00	420.470.750,00	91,67
	E Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	12.972.950.300,00	12.834.029.710,00	98,93

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
II	Rumah Sakit Umum Daerah	563.319.390.263,00	539.999.078.580,00	95,86
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	89.583.223.100,00	85.401.815.007,00	95,33
	B Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	473.736.167.163,00	454.597.263.573,00	95,96
III	Dinas Permukiman Penduduk	22.852.464.870,00	21.941.869.012,00	96,02
	A Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	22.852.464.870,00	21.941.869.012,00	96,02

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2023.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Masih perlunya optimalisasi dalam pencatatan pelaporan terutama diwilayah perbatasan termasuk validasi datanya, Belum optimalnya jejaring dengan rumah sakit di wilayah kerja puskesmas.	Mengoptimalkan validasi data dan memperkuat jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas.
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Masih perlunya optimalisasi dalam pencatatan pelaporan terutama diwilayah perbatasan termasuk validasi datanya, Belum optimalnya jejaring dengan rumah sakit di wilayah kerja puskesmas.	Mengoptimalkan validasi data dan memperkuat jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Masih perlunya optimalisasi dalam pencatatan pelaporan terutama diwilayah perbatasan termasuk validasi datanya, Belum optimalnya jejaring dengan rumah sakit di wilayah kerja puskesmas.	Mengoptimalkan validasi data dan memperkuat jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Masih perlunya optimalisasi dalam pencatatan pelaporan terutama diwilayah perbatasan termasuk validasi datanya, Belum optimalnya jejaring dengan rumah sakit di wilayah kerja puskesmas.	Mengoptimalkan validasi data dan memperkuat jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia Pendidikan dasar yang tidak sekolah belum semua teridentifikasi, minimnya jumlah posbindu remaja	Pendataan anak usia pendidikan dasar dengan melibatkan lintas sektor, mengaktifkan posbindu remaja untuk memberikan pelayanan kepada anak usia pendidikan dasar di luar sekolah
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Pencatatan pelaporan pada Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) masih belum lengkap (data pemeriksaan GDS dan pemeriksaan IVA test dan sadanis), sehingga masuk dalam pelayanan tidak sesuai standar, Masyarakat belum memahami pentingnya Skrining Kesehatan secara berkala pada usia produktif, terutama	Mengoptimalkan validasi/ reorientasi petugas entry data, Melakukan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala, Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam upaya skrining Kesehatan pada usia produktif, melakukan skrining kesehatan di setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan di tempat-tempat kerja, tempat-tempat umum, Menganggarkan penyediaan logistik yang

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
		wanita usia subur, Masyarakat belum semua memanfaatkan pelayanan kesehatan terutama puskesmas, sehingga puskesmas tidak dapat melakukan pelayanan skrining kesehatan pada seluruh sasaran usia produktif, Jumlah logistik pada sarana prasarana berikut yang belum sesuai dengan target	disesuaikan dengan target
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Logistik seperti Buku Kesehatan Lansia belum tersedia sesuai jumlah sasaran	Mengajukan permohonan dropping atau pemenuhan mandiri melalui anggaran APBD.
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Masyarakat penderita hipertensi masih banyak yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan secara rutin, Sarana prasarana dan logistik belum tersedia sesuai kebutuhan seperti pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE, tensimeter di	Mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat tentang pemantauan kesehatan penderita hipertensi secara teratur. Menganggarkan penyediaan logistik yang disesuaikan dengan target

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
		posbindu, form pencatatan SIPTM	
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Belum maksimalnya puskesmas dalam penginputan data di aplikasi SIPTM yaitu masih tidak lengkap pada variabel diagnosa dan hasil pemeriksaan gula darah pada saat pasien kontrol tidak diinput, Kurangnya alat penunjang pemeriksaan gula darah berupa glucometer dan strip gula darah, Kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait pemeriksaan rutin penderita diabetes melitus ke fasilitas kesehatan	Mengoptimalkan validasi/reorientasi petugas entry data, Menganggarkan penyediaan logistik yang disesuaikan dengan target, Mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat tentang pemantauan kesehatan penderita diabetes secara teratur
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Belum maksimalnya pelaksanaan skrining kesehatan jiwa ke fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, tempat kerja, lapas/rutan, panti sosial, lembaga rehabilitasi dan masyarakat	Terus melaksanakan koordinasi/sinergi dengan panti rehabilitasi dan melakukan monitoring laporan puskesmas

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
		(UKBM), Kurangnya koordinasi antar program di puskesmas, Belum optimalnya tenaga kesehatan melaksanakan kunjungan rumah, Masih minimnya pemeriksaan kesehatan jiwa di posyandu dan posbindu.	
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Belum maksimalnya penjarangan atau skrining terduga TBC di tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan, Stok logistik Bahan Habis Pakai (seperti pot dahak dan cartridge TCM) terbatas	Memaksimalkan kegiatan Investigasi Kontak di fasilitas pelayanan Kesehatan dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat untuk dapat memeriksakan suspek TBC ke fasilitas pelayanan Kesehatan, Menganggarkan penyediaan logistik yang disesuaikan dengan target
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kendala terkait sistem Aplikasi SIHA 2.1 yang terkadang mengalami gangguan dan update fitur, sehingga menghambat pencatatan pelaporan yang	Meningkatkan monitoring evaluasi program HIV. Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor juga LSM Penggiat HIV dalam rangka validasi sasaran.

NO	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
		dilakukan oleh tim HIV di Fasyankes dan penarikan laporan oleh tim program HIV di Dinas Kesehatan Kota Bekasi.	

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diperoleh oleh Kota Bekasi pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100	100
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,	100	Tidak ada

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota		
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	Tidak ada
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	81,15	90,90
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,32	90,90
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	94,94	97,4

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	65,23	51,85
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bekasi sebesar Rp. 986.658.874.902,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*). Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	URUSAN PEKERJAAN UMUM	1.049.277.696.074,00	986.658.874.902,00	94,03
I	DINAS TATA RUANG	26.029.624.128,00	22.893.532.000,00	88

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.223.756.215,00	16.004.561.163,00	87,8
	B	Program Penataan Bangunan Gedung	1.315.059.290,00	1.196.885.722,00	91
	C	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.490.808.623,00	5.692.085.115,00	87,7
II	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		824.863.252.591,00	782.000.945.767,00	94,8
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.864.296.115,00	31.691.900.605,00	88,4
	B	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	26.656.280.000,00	25.158.072.335,00	94,4
	C	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	280.479.108.274,00	273.107.169.410,00	97,4
	D	Program Pengembangan Permukiman	108.614.816.870,00	98.292.229.509,00	90,5
	E	Program Penyelenggaraan Jalan	344.477.875.452,00	328.789.296.448,00	95,5
	F	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.256.476.000,00	2.147.023.957,00	95,2
III	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		198.384.819.355,00	181.764.397.135,00	91,62
	A	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	25.430.697.573,00	21.432.650.546,00	84,28
	B	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	24.869.509.323,00	23.811.620.666,00	95,75
	C	Program Pengembangan Permukiman	54.498.842.257,00	51.850.934.674,00	95,14
	D	Program Penataan	93.585.770.202,00	84.669.191.249,00	90,47

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2		3	4	5
		Bangunan Gedung			

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2023.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A.	Perencanaan		
	1. Dasar dalam penentuan kebutuhan air minum berbeda tiap OPD, contohnya dalam menentukan jumlah penduduk, data yang digunakan bersumber dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau badan pusat statistik. Sumber air baku yang dapat dijadikan air	1. Diperlukan pendataan untuk penentuan kebutuhan air minum serta akses sanitasi layak dan aman; 2. Koordinasi dengan OPD terkait. 3. Diperlukan pendataan untuk penentuan kebutuhan air	1. Pendataan untuk penentuan kebutuhan air minum serta akses sanitasi layak dan aman dimasukkan dalam target renja dinas; 2. Meningkatkan koordinasi antar OPD. 3. Pendataan untuk penentuan kebutuhan air minum serta akses sanitasi layak dan aman dimasukkan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	minum sulit dicari; 2. Perhitungan kebutuhan untuk pengolahan air limbah domestik di kota Bekasi masih belum detail, hanya di titik-titik tertentu yang berdasar hasil survey rawan sanitasi. Diharapkan dengan adanya pendataan yang detail dan terinci pada seluruh penduduk kota Bekasi bisa dijadikan acuan untuk perhitungan kebutuhan pengelolaan air limbah domestic	minum serta akses sanitasi layak dan aman; 4. Koordinasi dengan OPD terkait	dalam target renja dinas; 4. Meningkatkan koordinasi antar OPD.
B	Koordinasi		
	1. Kurangnya sinkronisasi data antara Dinas Kesehatan, Disperkimtan dan Bappelitbangda mengenai jumlah akses sanitasi layak dan aman serta pengelola	1. Melakukan koordinasi dengan Dinkes dan Bappelitbangda . 2. Melakukan koordinasi dengan	1. Meningkatkan dialog dan koordinasi dengan Dinkes dan Bappelitbangda. 2. Terus meningkatkan dialog dan koordinasi dengan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	SPAM komunal tidak mencatatkan penyelenggaraan air minum dengan baik sehingga kesulitan dalam permintaan data; 2. Masih terdapat penolakan warga dalam pembangunan ipal skala kota, ipal komunal dan septik tank individual serta akses air minum perpipaan karena sumber air minum dari air tanah masih layak.	Perangkat warga untuk mengetahui dan mencari solusi bersama	perangkat warga.
C.	Pendanaan		
	1. Terbatasnya dana pembangunan fisik pembangunan bidang Air Minum dan bidang Sanitasi; 2. Terbatasnya akses untuk memperoleh sumber dana selain dari APBD dan DAK kegiatan Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi.	Melakukan koordinasi dan sosialisasi rencana pembangunan bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi kepada OPD terkait untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.	1. Mempersiapkan perencanaan dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan pengajuan untuk bantuan dari pusat atau kerjasama dengan swasta 2. Mencari informasi sumber-sumber pendanaan bidang air minum dan bidang sanitasi.

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
D.	Lain-lain		
	Sulitnya mendapatkan data untuk penyusunan pelaporan dari OPD terkait dan masyarakat penyelenggara air minum non perpipaan		Sulitnya mendapatkan data untuk penyusunan pelaporan dari OPD terkait dan masyarakat penyelenggara air minum non perpipaan

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kota Bekasi pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	0
1.d.2	Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	100	0
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	60,61	71,51
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,29	0,09
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	75,27

B. Realisasi Belanja Urusasan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bekasi sebesar 98.813.408.558,00 (*Sembilan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*). Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	112.880.101.905,00	98.813.408.558,00	87,53
I	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	112.880.101.905,00	98.813.408.558,00	87,53
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.515.984.674,00	17.346.984.143,00	84,55
	B Program Pengembangan Perumahan	2.496.965.655,00	2.361.521.318,00	94,58
	C Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	7.645.000.000,00	2.275.105.100,00	29,76

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	D Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	82.222.151.576,00	76.829.797.997,00	93,44

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2023.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
A.	Perencanaan		
	1. Data warga yang berhak memperoleh layanan diperoleh setelah terjadi kejadian bencana;	1. Mengidentifikasi kerusakan rumah akibat bencana sesuai dengan hasil survey serta mengajukan database hasil survey untuk diusulkan dalam program rutilahu;	Pembangunan kembali atau rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah dimasukan dalam target Renja Dinas
	2. Belum menganggarkan untuk pembangunan kembali	2. Melakukan perencanaan dan penganggaran	

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	atau rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah.	dalam rencana kerja dinas.	
B.	Koordinasi		
	Masih belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam	Diperlukan koordinasi yang lebih optimal dengan OPD Terkait	Membuat Standar Operasional Prosedur penanganan rutilahu akibat bencana
C.	Pendanaan		
	Anggaran peningkatan rutilahu akibat bencana sudah masuk kedalam renja Disperkimtan, namun untuk pemberian ganti rehabilitasi rumah layak huni korban bencana, warga negara yang berhak mendapatkan layanan baru dapat ditentukan setelah adanya bencana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah terkait status	Apabila terdapat kekurangan anggaran dapat diajukan di APBD	Mengajukan usulan dan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	kebencanaan		
D.	Lain-lain		
	-	-	-

5. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kota Bekasi pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	95,39	99,41

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	99,41
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	90,75
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,12	9,88

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi sebesar Rp.

157.038.236.780,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		191.171.318.696,00	157.038.236.780,00	82,14
I	Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan	87.973.737.735,00	62.498.724.276,00	71
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	51.269.857.105,00	27.825.381.297,00	54,3
	B Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	36.703.880.630,00	34.673.342.979,00	94,5
II	Satuan Polisi Pamong Praja	92.817.098.905,00	84.907.857.434,00	91,5
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan	73.246.314.655,00	68.177.373.904,00	93,1

NO	PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Daerah Kabupaten/ Kota			
	B Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	19.570.784.250,00	16.730.483.530,00	85,5
III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.380.482.056,00	9.631.655.070,00	92,8
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.681.669.195,00	4.223.230.844,00	90,2
	B Program Penanggulanga n Bencana	5.698.812.861,00	5.408.424.226,00	94,9

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2023.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Permasalahan	
1.	Pengumpu landata	Karena padatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, berdampak pada banyaknya kegiatan dan Ketertiban Umum.	
2.	Penghitung -an kebutuhan	Dalam penghitungan kebutuhan personil, banyaknya regulasi dan kebutuhan di lapangan berdampak pada sulitnya melakukan penghitungan logis kebutuhan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.	
3.	Perencana an dan penganggar -an	Karena di tahun 2022 nomenklatur kegiatannya tidak ada, maka Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa menetapkan Indikator SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi Indikator Program/Outcome, karena dikhawatirkan akan membawa dampak penganggaran, sehingga indicator SPM tersebut ditempatkan sebagai Indikator Kegiatan pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentgraman dan Ketertiban Umum di Tahun Anggaran 2023.	

No	Uraian	Permasalahan	
4.	Pelaksana-an	Rasio pemenuhan barang/jasa dan personil anggota Satpol PP yang ada belum sebanding dengan jumlah personil Satpol PP yang ada, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2019, sehingga dikhawatirkan Satuan Polisi Pamong	

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Bekasi pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kota Bekasi sebesar Rp. 1.653.642.302.467 (*Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Empat Ratus Enam PULuh Tujuh Rupiah*). Dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
URUSAN SOSIAL		(32.019.890.719,00)	(27.416.231.841,00)	85,62
I	DINAS SOSIAL	(32.019.890.719,00)	(27.416.231.841,00)	85,62
	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.713.646.335,00	11.488.039.623,00	90,36
	B Program	3.266.735.000,00	2.816.187.400,00	86,21

NO	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pemberdayaan Sosial			
	C Program Rehabilitasi Sosial	7.650.364.300,00	6.627.934.073,00	86,64
	D Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.628.963.084,00	3.626.936.260,00	78,35
	E Program Penanganan Bencana	3.211.657.000,00	2.324.516.984,00	72,38
	F Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	548.525.000,00	532.617.501,00	97,10

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2023.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perencanaan		
	Data PPKS	Melakukan Verifikasi dan validasi terhadap Data PPKS	Melakukan kegiatan pendataan PPKS
2.	Koordinasi		
	-	-	-
3.	Pendanaan		
	Minimnya anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan	Memetakan kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar	Mengusulkan kebutuhan

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	Minimal		
4.	Lain-lain		
	Minimnya Sarana dan Prasana	Memetakan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang SPM	Mengusulkan kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana
	Minimnya SDM	Melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap SDM yang memahami tentang background kesejahteraan sosial	Mengusulkan kegiatan kebutuhan penerima tenaga kesejahteraan sosial

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022, Kota Bekasi berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,1703 dan status kinerja Sedang.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 5B/S-HP/XVIII.BDG/04/2023 Kota Bekasi berhasil mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2022, yang berarti opini audit yang diterbitkan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Audited/Unaudited) Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. Rp.6,141,461,290,655,00- (*Enam Trilyun Seratus Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) Dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 mencapai Rp.6,411,452,063,828,00,- (*Enam Triliyun Empat Ratus Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam*

Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.997.679.830.479,00	2.729.779.692.051,00	91,06

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2.1	BELANJA OPERASI	5.834.763.094.939,00	5.204.106.779.408,00	89,19

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2023.

5. INOVASI DAERAH

Pemerintah Kota Bekasi senantiasa mengembangkan Inovasi yang berguna tidak hanya bagi Penyelenggaraan Pemerintahan melainkan untuk pelayanan publik. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bekasi tidak kurang memiliki total 301 Inovasi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
1	DISDUKC- APIL	1	E-OPEN (Elektronik <i>Online</i> Pelayanan Kependudukan)
		2	SIPADAT BERISI (Sistem Pemanfaatan Data Berbasis Internet)
		3	PAMOR SAPA WARGA (Proffing Data Kependudukan)
		4	SILAMPID (Sistem Informasi Lahir Mati Pindah Datang)
		5	GIS DISDUKCAPIL (Sistem Informasi Geografis)
		6	HALO PAMOR (HALO PETUGAS PANTAU DAN MONITORING)
		7	SIP ORA (Sistem Pelayanan Orang Asing)
		8	MOTEKAR BERSAHAJA (Mohon KTP Elektronik Sekarang Diberikan Satu Hari Jadi)
		9	DUDUK MESRA (Pengaduan Disdukcapil Melayani Masyarakat)
		10	PO ASIH MAS DUKI (Permohonan Konsolidasi Bersih Masalah Kependudukan Bekasi)
		11	ANDUK BANG BEK (Pelayanan Kependudukan Bagi Yang Berkebutuhan Khusus)
		12	SITI BAWA LUDO (Sistem Terintegrasi Bagi Warga Luar Domisili)
		13	MANTEL GADIS (Perekaman KTP El Bagi Pemula Di Sekolah)
		14	PATRIOT BEKEN (Pelayanan Terintegrasi On The Spot Berbasis Kelurahan)
		15	NASI UDUK DI CFD BEKEN (Nyok Akh Warga Bekasi Urus Adminduk Di Car Free Day Bekasi Keren)

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
		16	MOTO KTP (Mohon Ganti Photo Ktp Elektronik)
		17	PATRIOT MANTAP (Pelayanan Terintegrasi On The Spot Malam Hari Dengan Tatap Muka)
		18	TIM PATIN PELANDUK (Tim Percepatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)
		19	PERMISI (Permohonan Menjadi Warga Kota Bekasi)
		20	SOP DUREN (Sistem Optimalisasi Pendataan Penduduk Rentan)
		21	PENSIL KEREN (Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Kerjasama yang Sinergis)
		22	PATRIOT SAKTI (Pelayanan Administrasi Terintegrasi On The Spot di Stasiun Kereta Api)
		23	PECAK PATIN (Pencatatan Perkawinan dengan Pelayanan Terintegrasi)
		24	PATRIOT DANTA (PELAYANAN ADMINDUK TERINTEGRASI ON THE SPOT DI KANTOR KECAMATAN)
		25	ANDA SULTAN DISDUKCAPIL (LAYANAN DARING KONSULTASI PENGADUAN DISDUKCAPIL)
2	RSUD- CAM	26	SIBEROJOL (Sistem Berobat Jalan Online)
		27	SITARO (Pelayanan Sistem Antar Obat)
		28	AADC (Ada Apa Dengan <i>CathLab</i>)
		29	LAPORMETER (Pelayanan Poli Forensik dan Medikolegal yang Terintegrasi)
		30	SI PCR VID (Aplikasi PCR COVID-19)

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
		31	SAHRONI (Sistem Administrasi dan Hasil Radiologi Online Inovatif)
		32	SMPK (Sertifikasi Medis Penyebab Kematian)
		33	SIPEKAN (Aplikasi Pesan Makan Pasien)
		34	SIKAWAN (Aplikasi Kepegawaian)
		35	SIMARUCAM (Sistem Informasi Kefarmasian)
3	BAPENDA	36	IPBB (Informasi Pelayanan Pajak Bumi Bangunan)
		37	SIPDAH / ESPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) / (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
		38	SIS VALLEN (Sistem Informasi Pelayanan Validasi SSPD BPHTB Online)
		39	POS RD (<i>Payment Online System</i>) Retribusi Daerah
		40	SISTOPER (Sistem Otomatisasi Perencanaan)
		41	MISTER PBB (Manajemen Informasi Integrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan)
		42	SKK (Surat Kuasa Khusus) Penagihan Pajak Daerah)
		43	KLEPON (Konsultasi dan Layanan Pajak Daerah On Weekend)
4	DPMPTSP	44	CE IMA (CETAK IZIN MANDIRI)
		45	SIMPEL ANTRI (Sistem Informasi Pelayanan Antrian Terintegrasi)
		46	LANGSAM (Pelayanan Siang Malam) PTSP

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
		47	<i>HIGH SPEED TAX REKLAME SERVICE</i>
		48	SILAT (Sistem Informasi Layanan Terpadu)
		49	MPP (Mall Pelayanan Publik)
5	DINSOS	50	E-SOSIAL (Elektronik Sosial)
		51	OP3KS / PALU KEBAB (Optimalisasi Pelayanan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
		52	SIKITA (Sistem Verifikasi dan Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial)
		53	BDT (Basis Data Terpadu)
		54	PPS (Plasa Pelayanan Sosial)
		55	SIPANSOS (Sistem Pengaduan Sosial)
		56	SKETER online (Surat Keterangan Terdaftar Bagi LKS / Yayasan)
		57	SLOT (Sistem Layanan Orang Terlantar)
		58	LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)
		59	BANG BILI (Bantuan Alat Bantu Bagi Disabilitas)
6	DBMSDA	60	SIPJALU (Sistem Informasi Pengendalian Pajak Penerangan Jalan Umum)
		61	PEMATUSAN
		62	<i>PATRIOT EYECLICK SYSTEM</i>
		63	URC PJU (Unit Reaksi Cepat Penerangan Jalan Umum)
		64	URC BINA MARGA
		65	<i>E-BUFFER</i>

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
7	DISKOMI-NFOSTA-DI	66	PDSS (<i>Patriot Decision Support System</i>)
		67	E-OFFICE (Elektronik Online Pelayanan Kantor)
		68	SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)
		69	MONIKA (Monitoring Keamanan Informasi)
		70	DANTA (Portal Satu Data Kota Bekasi)
		71	PSW (PATRIOT SINGLE WINDOW)
8	DP3A	72	KECALA (Kecamatan Layak Anak)
		73	SI ANAK CERDAS (Sistem Aplikasi Informasi Anak Cerita Aduan dan Solusi)
		74	FORAKSI (Forum Anak Kota Bekasi)
		75	TESA (Telepon Sahabat Perempuan dan Anak)
9	DISDIK	76	PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ONLINE
		77	TIKOM SABAR (Tiga Komponen dalam Satu Lembar)
		78	SIJALURING (Sistem Pembelajaran Daring dan Luring)
		79	JAREKTIF 6 S (Pembelajaran Efektif Enam S)
		80	MGMPs 4.0 (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah 4.0)
		81	SI MOLEK (Sistem Mading online Keren)
		82	BuWaLiDi (Buletin Pandawa Lima Digital)
		83	SMART KITA (Sistem Manajemen Pembelajaran Ramah Pengguna dan

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
			Terpadu - Karya Inovasi Terkini dan Aplikatif)
		84	SISUPEL (Sistem Supervisi Pembelajaran)
		85	SIDITAKA 12 (Sistem Digital Perpustakaan 12)
		86	SILABUSINTAL 12 (Sistem Pengusulan Kebutuhan Sekolah Berbasis Inovasi Digital 12)
		87	KOMPETEN KEREN (Komunikasi Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi)
		88	SIMONTIR (Sistem Monitoring Banjir)
10	KEC. MEDAN SATRIA	89	BATA MESRA (Bank Data Kecamatan Medansatria)
		90	MESRA MENYAPA (Medan Satria Melayani dan Menyapa Warga)
		91	MESRA MELAYAT (Medansatria Melayani Administrasi Kematian) dan MESRA HAPPY (Medansatria Hadir Pelayanan Pasca Persalinan Bayi)
		92	PESONA BEKASI KEREN (Pelayanan Siaga On Area)
		93	MASTAMPAN (Masyarakat Tangguh dan Mampu Dalam Penanggulangan Bencana)
		94	SIITIK (Sistem Informasi & Intervensi Stunting kalibaru)
		95	UMKM GO TO SCHOOL
		96	LABA (Layanan Administrasi Berusaha Warga)

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
11	KEC. BEKASI TIMUR	97	SAPU LIDI (Siswa Peduli Lingkungan)
		98	SIAP DIFOTO (Sistem Pelayanan Aplikasi Digital Front Office)
		99	PERHIASAN TIMUR (Perayaan Khitanan Massal Kecamatan Bekasi Timur)
		100	FESTIVAL BUDAYA PATRIOT BEKASI TIMUR
		101	LAMAR SI NENG (Pelayanan Malam dan Pasar Rakyat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
		102	OSIS TIMUR (Operasi Sayang Siswa Bekasi Timur)
		103	JEBOLAN TIMUR (Jemput Bola Pelayanan Bekasi Timur)
12	DISARPU-SDA	104	POJOK BACA
		105	KOLECER (Kotak Literasi Cerdas)
		106	PUSLING (Perpustakaan Keliling)
		107	PIPABUK (Pinjam Pakai Buku)
13	BAPPELI-TBANGDA	108	SIENCANG (Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran)
		109	SIDIKJARI (Sistem Informasi Data Induk Kelitbangan dan Jaringan Inovasi)
		110	SIBANDEK (Sistem Pengusulan Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta)
		111	TABANG (Data Pembangunan Kota Bekasi)
		112	MONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan)
		113	PELITA (PEMETAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KOTA BEKASI)

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
14	SETDA	114	PANGSI (PAMONG INOVASI KOTA BEKASI)
		115	SAKTI (Sistem Administrasi Ketatausahaan Terintegrasi Berbasis Teknologi)
		116	SIMPELBANG (Aplikasi Sistem Pelaporan Pembangunan)
		117	SIJIWA (Sistem Informasi Perjanjian Sewa)
		118	E-SAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
		119	SiAkip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
		120	SAKER HUMAS (E-Kliping dan E-Rilis)
		121	SIHARSA (Sistem Informasi Harga Satuan)
		122	BEST (<i>Bekasi Emergency System</i>)
15	BPKAD	123	SIMDARA V.2 (Sistem Informasi Manajemen Persediaan Daerah)
		124	E-PRODGET (Performance Budget Model)
		125	SATE (Sistem Akuntansi Terintegrasi)
16	KEC. BEKASI BARAT	126	IKAT GESPER (Inovasi Kecamatan Bekasi Barat dalam Gerakan Serentak Pertumbuhan Ekonomi Rakyat)
		127	TASIK dan TA-LINE (Hasil Produk UMKM Melalui Etalase Asyik dan Etalase Online)
		128	BINTARA BANGKIT

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
		129	SIP-PALUR (Sistem Informasi Pelaporan Pamor Kelurahan)
		130	MANJAKAN PELAYANAN (TAMAN JAJAN MAKANAN DAN PELAYANAN)
		131	SPARKO (Senam Spartan Komando)
		132	PPLPD (Program Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)
17	DISPORA	133	SITALI (Sistem Informasi Digitalisasi)
		134	PENETAPAN ATLET PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR
		135	SITARU (Sistem Informasi Ketataruangan)
		136	ARSIP DIGITAL KETATARUANGAN
18	DISTARU	137	SICANDRA (Sistem Informasi Rencana Tapak Terintegrasi Masterplan Drainase)
		138	SITARU 2022 (Sistem Informasi Ketataruangan versi 2022)
		139	LAPORQU (Lapor Qurban)
		140	BICOV19 (Borang Informasi Aktifitas Kegiatan Selama COVID-19)
19	DKPPP	141	CCR ATCS (Comand Center Room Automatic Management Traffic Control System)
		142	MOPERAS (Mobil Pengeras Suara Dishub)
20	DISHUB	143	PUSDALOP (Pusat Pengendalian Operasional Petugas Lalu Lintas)
		144	E-KIR KOTA BEKASI
		145	BANK SAMPAH RAWA LUMBU

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
	RAWALU MBU	146	SIECAM (Sistem Informasi Elektronik Kecamatan Rawalumbu)
		147	PERCEPAT
		148	RABU PINTAR (rawalumbu pintar)
		149	PESTA SENJA RABU (pentas seni dan jajanan rawalumbu)
		150	RABU SENDU (rawalumbu sentra pelayanan terpadu)
		151	RABU BERBAGI (Rawalumbu Bergerak dan Berbagi)
		152	RABU PATRIOT (Rawalumbu Pelayanan Kesehatan Terintegrasi On The Spot)
		153	SIJONI (Sistem Jaminan <i>Online</i>)
22	DINKES	154	SIRINE PSC 119 (Sistim Rujukan Online)
		155	SIPO (Sistem Informasi Pengelolaan Obat)
		156	KEBAS TBC (Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kecamatan Bebas TBC) dengan 5T
		157	PELAYANAN NYAMAN & SMART : (S) Sepenuh Hati (M) Mudah (A) Amanah (R) Ramah (T)Terpercaya
23	DISNAKER	158	SIKAT (Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu)
		159	BUSI (Bursa Kerja Sikat)
		160	BOOKING ANTRIAN <i>ONLINE</i> E-KTP
24	KEC. BEKASI UTARA	161	SIMPARTI (Sistem Informasi Terintegrasi)
		162	Pojok Pamor Kecamatan Bekasi Utara

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
		163	ULI KIARA (rabU keLiling Kecamatan bekasI utARA)
25	DISDAMK-AR	164	KO-RAIP (Kolaborasi Radio Komunikasi dengan Aplikasi Radio Komunikasi Berbasis Internet Protokol)
		165	SITEKAR (Sistem Informasi Proteksi Kebakaran)
		166	SIGERCEP DISDAMKAR BEKEN (Sistem Informasi Gerak Cepat Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan untuk Bekasi Keren)
26	DLH	167	AQMS (<i>Air Quality Monitoring System</i>)
		168	SPPATS (Sistem Pengaturan Parkir Armada Truk Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sumurbatu)
		169	OPPSMH (Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Sampah Melalui <i>Hotline</i> Di Wilayah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)
		170	CAR FREE DAY (Hari Bebas Kendaraan Bermotor)
		171	DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)
		172	SI GERCEP KEREN (Sistem Gerak Cepat Keren)
		173	SATGAS KALI BEKASI
		174	PROKASIH KEREN (PROGRAM KALI BERSIH)
27	DISDAGP-ERIN	175	PALIPAT (Pelayanan Pasar Online di Pasar Rakyat)
		176	Maskot Kota Bekasi "Bang Bek & Mpok Asi"

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
		177	MUTER Bekasi (Mobil Untuk pelayanan Tera/ tERa ulang Bekasi)
		178	SiyanTe Telang (Sistem Informasi Pelayanan Tera/Tera Ulang)
		179	SiyanTRI KOBK (Sistem Informasi Pelayanan Industri Kota Bekasi)
		180	SI MPO DAGANG (Sistem Informasi Perdagangan)
		181	SI DAHAR BAKO (Sistem Informasi Data Harga Bahan Pokok)
28	KEC. BANTAR GEBANG	182	<i>Contact Center Services</i>
		183	SIHARTA (Sistem Informasi Arsip Pertanahan)
		184	SIBANGMOI (Sistem Informasi Bantargebang Mobile Presensi)
29	DISPARB-UD	185	GKSS (Gelar Karya Sanggar Seni)
		186	ABANG PAKEM (Aplikasi Budaya Pariwisata Kreatif dan Pemasaran)
30	SETWAN	187	Sistem Informasi Aspirasi Publik Sekretariat DPRD Kota Bekasi
		188	S-SIAPD (Sistem Informasi Aplikasi Perjalanan Dinas)
		189	Pengelolaan Media Center Sekretariat DPRD Kota Bekasi
		190	E- RISALAH (Elektronik RISALAH)
31	KEC. BEKASI SELATAN	191	Program Penguatan Ekonomi dimasa Pandemi di Kecamatan Bekasi Selatan
		192	KOBAR (Kongkow Bareng Rukun Warga)
32	KEC.	193	SIDARSIH (Simple Data Jatiasih)

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
	JATIASIH	194	SISDAPOR (Sistem Pengendalian Dan Pelaporan Satgas Pamor)
		195	PERTAMAX MANJA (Pelayanan Masyarakat Tambah Maksimal di Halaman Jatiasih)
33	SATPOL PP	196	SI POL PP (Sistem Informasi Polisi Pamong Praja Kota Bekasi)
		197	Penegakkan Perda Satpol PP Kota Bekasi Melalui Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) secara Online
		198	Optimalisasi Penegakkan PERDA Melalui Manajemen Penindakan Pelanggar PERDA di Kota Bekasi
		199	Implementasi Peningkatan Pemahaman Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bekasi Sesuai Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 dan Perda Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015.
		200	SIMPELGIAT (Sistem Pelaporan Kegiatan)
		201	ADA TRANTIB (Aplikasi Digital Pendataan Ketentraman dan Ketertiban Umum)
34	KEC. MUSTIKA JAYA	202	Sitravis (<i>Service Tracking System</i>)
		203	Jumat Nyaba Kecamatan Mustikajaya
		204	BABE KECEK MJ (Barang Bekas untuk Ketahanan Ekonomi Keluarga Mustikajaya)
		205	SITAMPAN (Sistem Notifikasi Administrasi Kepegawaian)
		206	PERAMAL (Pelayanan Rabu Malam)
		207	BUM (Badan Usaha Milik) RW 21

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
35	DPKPP (DISPERKI -MTAN)	208	PRO ABU LOKAL (Prototipe Arsitektur Budaya Lokal pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Bekasi)
		209	PROSANTI (Program Sanitasi Berbasis Teknologi Informasi)
36	ITKO	210	MIT (Manajemen Inspektorat Terpadu)
37	KEC. JATISAMP -URNA	211	PROGITA (Program Digitalisasi Arsip) Kecamatan Jatisampurna
		212	[SIACEP] Sistem Informasi Arsip dan Catatan Elektronik Pengarsipan
		213	PESELAM JASAM (Pelayanan Senin Malam Jatisampurna)
		214	KOPLING (Kopi Keliling)
38	KEC. PONDOK MELATI	215	POMEL BERAksi (Program Kamis Kreasi, Kecamatan Pondok Melati)
		216	KAMIS KREASI
		217	PENJAGA HATI
		218	PARKIR DI POMEL
39	BADAN KESBANG -POL	219	E-SIPENG (Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Kinerja)
40	KEC. PONDOK GEDE	220	SIDARLING (Sistem Informasi Sadar Lingkungan)
		221	SIPREON (Sistem Pemilihan Rw Secara Online)
		222	Penerapan Adaptasi Pola Kehidupan Baru terhadap para pelaku UMKM pada masa pandemi covid 19
		223	GEBAK BEKEN (GEBYAR UMKM BEKASI KEREN)
41	DPPKB	224	TUMBANG (Pemanfaatan Jejaring Sosial

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
			Sebagai Sarana Penyuluhan Proses Tumbuh Kembang Anak Pada Masa Pandemi)
		225	Kampung KB Sedap Malam Pondok Melati
42	BPBD	226	TRC-PB (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana)
43	BKPSDM	227	SUNMORI SIAP (Sistem Informasi Aparatur) berbasis Mobile
		228	SIKERJA (Sistem Aplikasi Kinerja Aparatur)
		229	Layanan Psikotes dan Konseling
		230	PENGKOM (Pengembangan Kompetensi) PNS
		231	Coaching dan Mentoring Clinic PNS Kota Bekasi
		232	Pemagangan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
		233	SI MPOK (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Kepegawaian)
44	PKM JATIASIH	234	LENTERA (Pelayanan Terapi Wicara)
		235	TERATUR JO / ATUR AJA SIH (Terapi Medik Akupuntur dr. Jojo) / (AKUPUNTUR JATIASIH)
45	PKM JAKASE-TIA	236	POLANTAS (Program Layanan Lansia dan Disabilitas)
		237	BANTING SETIR (Bersama Atasi Stunting Sehat Ibu dan Buah Hati Menjadi Generasi Bersinar)
46	PKM BOJONG RAWA	238	NASEHAT IBU (Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi Puskesmas Bojong Rawalumbu)

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
	LUMBU	239	PIO QR RABU (Penguatan Informasi Obat Covid Menggunakan QR Code UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu)
		240	SI NAKES D'INSTA RABU (Informasi Layanan Kesehatan melalui Video Instagram Bojong Rawalumbu)
		241	PERI GIGI BAIK HATI (Pemeriksaan Gigi Ibu Hamil Kuat, Sehat, Ceria)
		242	TURING SI BOLANG RABU (Kartu Monitoring Hasil Laboratorium bagi Prolanis di Puskesmas Bojong Rawalumbu)
		243	BOLU KUKUS KUNING (Bojong Rawalumbu Kurangi Kasus Kurang Gizi dan Stunting)
		244	PASAK KUAD NENG LILI (Penggunaan Alat Sanitarian Kit dalam Pengukuran Penyehatan Udara untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan saat Pandemi Covid)
		245	SI MANDRA MAKAN BOLU (Skrining Mandiri Kesehatan Masyarakat Bojong Rawalumbu)
47	PKM PERUMNAS 2	246	SI BUMIL ASIEK (Sistem Informasi Ibu Hamil dan Asi Eksklusif)
48	PKM KARANGK -ITRI	247	BUNG SENJA (Tabungan Sedot Tinja)
		248	GEBUK STUNTING (Gerakan Cegah Gizi Buruk dan Stunting)
49	PKM JATILUHUR	249	JaWilKitting (Jaga Wilayah Kita dari Stunting)
50	DKUKM	250	SIP3 (Sistem Informasi Pemberdayaan,Pembiayaan dan Promosi

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
			UMKM di Kota Bekasi)
		251	OD S (Operating Data System)
51	PKM JATIMAK-MUR	252	SI EDU ASIK BUMILIN JATMAK ((Sistem Edukasi Asi Eksklusif untuk Ibu Hamil dan Ibu Bersalin di Wilayah Kerja Puskesmas Jatimakmur))
52	PKM JATIBENING	253	BE – GO GREEN(BENINGERS GO GREEN)
		254	PERMATA BENING (Pelaporan Jumantik Digital Puskesmas Jatibening)
53	PKM CIMUNING	255	SI TAMU SUSI (Sertifikat Balita Cimuning Wisuda Imunisasi)
		256	SAPA CING PETIR (Selasa Pagi Cimuning Bebas Penyakit Tidak Menular)
54	PKM BOJONG MENTENG	257	GEMBUR GEMARI (Gemar Makan Buah dan Sayur serta Gemar Makan Ikan)
55	PKM PEKAYON JAYA	258	TEKOJASULIN
56	PKM TELUK PUCUNG	259	PELUANG EMAS (PELatihan Untuk PengembANGan aplikasi E-puskesMAS)
57	PKM PEDUREN-AN	260	LASKAR PELANGI (LAporan pelakSanaan KAdER PEnimbangan baLitA daN Gizi)
		261	TUAN RUMAH (Pemantauan Kesehatan Rumah Singgah)
58	PKM JAKA MULYA	262	SIBIJAK (Inisiasi Penggunaan Sistem Informasi Bertanya Jaka Mulya Berbasis Digital)
		263	SIBIJAKMUL (SISTEM INFORMASI BERTANYA DIGITALISASI JAKA MULYA)

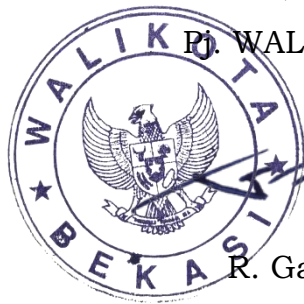
NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
59	PKM DUREN JAYA	264	DAYANG BUMIL (Duren jaya sAYANG iBU haMIL)
60	PKM JAKA SETIA	265	Optimalisasi Media Promosi Kesehatan melalui "PojoK Promkes Ber-QR Code" di UPTD Puskesmas Jakasetia
		266	GEBER 1000 CHATING (Gerakan Bersama 1000 Hari Pertama Kehidupan Cegah Anak Stunting)
61	PKM AREN JAYA	267	SI OSPAR (Sistem Informasi Orangtua Sadar Parenting)
62	PKM MARGA JAYA	268	ABANG MESI (Aku Bangga Memberikan ASI Eksklusif)
		269	MPOK PEWE (Kelompok PTM Walikota) dan donor darah PMI
		270	SISUKAKI (SIAP SUNTIK KANAN KIRI)
63	PKM JATI RAHAYU	271	SIKEJU (Skrining Kesehatan Setiap Hari Jum'at)
64	PKM KALI BARU	272	E-GIMIL CANTIK (Elektronik Gizi dan Kesehatan Ibu Hamil Cegah Anemia dan Stunting di Kali Baru)
65	PKM SEROJA	273	RESTU (Revitalisasi Investigasi Tuberculosis)
66	PKM PERWIRA	274	KAWAN MANTRI (KeluArga RaWAN MANDiri TeRedukasiI)
67	PKM KRANJI	275	MPOK PETIME (Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular)
68	PKM JATI KARYA	276	KONDANGAN (KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN IBU HAMIL BERSAMA DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN)
69	PKM JATI	277	TRIPBUMIL (PEMERIKSAAN TRIPLE

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
	KRAMAT		ELIMINASI IBU HAMIL)
70	PKM JATI MEKAR	278	MASKULIN (Masjid Sehat dengan Puskesmas Keliling UPTD Puskesmas Jatimekar)
71	PKM JATI RANGGON	279	SI KELING BRO (SKRINING DAN KONSELING BERHENTI MEROKOK)
72	PKM JATI WARNA	280	PASAR KECAPI (Pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan calon pengantin)
73	PKM CIKIWUL	281	GEBER CETING (Gerakan Bersama Cegah Stunting)
74	PKM HARAPAN MULYA	282	GARDU SICANTING
75	PKM HARAPAN BARU	283	TASPEN BALI (Tuntaskan Sebelas Penyakit Berbasis Lingkungan)
76	PKM PEJUANG	284	PERIBUMI (Periksa Balita Beresiko dan Ibu Hamil Anemi)
77	PKM BINTARA JAYA	285	MPO ATIK (Metode Penyuluhan Obat Antibiotik)
78	PKM BINTARA	286	SI LINDA (Silahkan meniLai kami meNjaDi lebih bAik)
		287	SAKINA (Stop Angka Kematian Ibu daN Anak)
79	ARSIP INOVASI	288	Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kota Bekasi
		289	NEOTRANS (New Normal Transportasi Umum)
		290	NEORESTO (New Normal Restoran)

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	INOVASI
		291	Implementasi Tataan Normal Baru AIR (Adaptasi, Interaksi, Rezeki)
		292	Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik DPMPTSP pada New Normal Life
		293	NEOSATA (New Normal Tempat Pariwisata)
		294	NEOTEL (New Normal Hotel)
		295	NEOPAMOR (New Normal Pasar Modern)
		296	STAYCATION DI HOTEL KOTA BEKASI
		297	NEOPATRA (New Normal Pasar Tradisional) Kota Bekasi
		298	PORMASI (Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan Kota Bekasi) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		299	Optimalisasi Bank Sampah Sebagai Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Pekayonjaya
		300	Satgas Pamor (Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring)
		301	KETUK MESRA (Pelayanan JEMPUT BOLA)

Bekasi, 27 Maret 2024

P. WALI KOTA BEKASI,



R. Gani Muhamad